LAPORAN KINERJA
(LKJ)

SEKRETARIAT DPRD KOTA GUNUNGSITOLI
TA. 2018

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ii

Ikhtisar Eksekutif iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi 4

1.3. Maksud dan Tujuan 9

1.4. Visi dan Misi Perangkat Daerah 9

BAB II PERENCANAAN KINERJA 11

2.1. Rencana Strategis Perangkat Daerah 11

2.2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2018 13

2.3. Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2018 14

2.4. Cascading Perangkat Daerah Tahun 2018 21

2.5. Rencana Aksi Perangkat Daerah Tahun 2018 23

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 30

3.1. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2018 30

3.2. Analisis Capaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2018 31

3.3. Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2018 Dengan Tahun Sebelumnya 34

3.4. Realisasi Keuangan Perangkat Daerah Tahun 2018 34

BAB IV PENUTUP 39

4.1. Kesimpulan 39

4.2. Saran 39

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas perkenan-Nya sehingga Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja ini berisi Informasi Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2018, yang dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Pimpinan dalam pengambilan keputusan, perbaikan manajemen dan mendorong peningkatan kinerja instansi pemerintah yang akuntabel, efisien, efektif dan responsive dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar.

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018 ini, tentunya masih terdapat kekurangan, untuk itu diharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak guna penyempurnaan di masa yang akan datang.

Gunungsitoli, 31 Januari 2019
SEKRETARIS DPRD KOTA GUNUNGSITOLI,

MEISONIMAN LAHAGU, SH, M.Si
PEMBINA
NIP. 19690519 200112 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Seiring telah berakhirnya pelaksanaan APBD Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018 tanggal 31 Desember 2018, maka sesua sesuai Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap instansi diwajibkan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) secara berjenjang kepada instani/unit atasannya. Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli selaku bagian dari Pemerintah Kota Gunungsitoli telah menyelesaikan implementasi Program Kerja Tahun Kedua dari Rencana Strategi periode tahun 2016 – 2021 yang diwujudkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Implementasi ini telah memberikan arah yang jelas dalam upaya peningkatan kinerja Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli dalam melaksanakan visinya: ***"Sekretariat DPRD Prima Dalam Pelayanannya"***. Dengan misi : ***Meningkatkan Kemandirian Serta Menata Sistem Kerja Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli Dalam Melaksanakan Tugas dan Meningkatkan Mutu Layanan Yang Cepat Serta Akurat"***.

Lakip ini dapat berfungsi sebagai media pertanggungjawaban yang berisi informasi Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli dalam menyelengarakan tugas dan fungsinya dengan baik dan benar yang didasarkan pada Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, kebijaksanaan yang transparan dan menjadikan Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsive khususnya terhadap lembaga DPRD yang dilayaninya, umumnya terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.

Capaian Kinerja yang diperoleh akan terus ditingkatkan kinerjanya pada masa yang akan datang. Demikian yang disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Gunungsitoli, 31 Januari 2019
SEKRETARIS DPRD KOTA GUNUNGSITOLI,

MEISONIMAN LAHAGU, SH, M.SI
PEMBINA
NIP. 19690519 200112 1 002

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Daerah selaku penyelenggara urusan pemerintah telah diberi kewenangan untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah. Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, maka pemerintah harus menerapkan prinsip-prinsip good governance sesuai asas umum penyelenggaraan Negara sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Terselenggaranya good governance merupakan syarat utama untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita. Pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata, mutlak diperlukan sehingga penyelenggaraan pemerintah dapat dilakukan secara efektif dan efesien. Perlunya system pertanggungjawaban pemerintah daerah atas segala proses tindakan-tindakan yang dibuat dalam rangka tata tertib menuju instrumen Kinerja daerah yang merupakan bagian terpenting untuk di tata, yang pada akhirnya akan menjadi instrumen good governance.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka setiap Instansi Pemerintah Daerah diharuskan menyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun Anggaran 2018, sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja dan tata cara refiuw atas laporan kinerja instansi pemerintah. LKj merupakan cerminan prestasi sebuah Instansi dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya serta evaluasi terhadap berbagai program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Baik buruknya hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan masukan bagi Instansi dimaksud untuk meningkatkan atau memperbaiki kinerjanya pada masa yang akan datang.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 Tahun sesuai visi, misi, dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran dari program yang realitas dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) dibutuhkan sistem kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan suatu sistem dimana setiap SKPD merencanakan, melaksanakan, mengukur, dan memantau kinerjanya sendiri serta melaporkan kepada Instansi yang lebih tinggi dan menjadi alat penilai terhadap kuantitas dan kualitas kerja. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu Instansi pemerintah, maka seluruh aktivitas Instansi tersebut harus dapat diukur baik pada masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak dari program.

Sebagai salah satu Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Gunungsitoli, Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli wajib mempertanggungjawabkan program dan kegiatannya baik pertanggungjawaban secara rutin maupun pertanggungjawaban atas permintaan pihak Instansi yang lebih tinggi. Salah satu bentuk pertanggungjawaban oleh Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli yaitu membuat Laporan Kinerja (LKj) guna menilai dan mengevaluasi kinerja Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli selama 1 (satu) tahun anggaran, berdasarkan tolok ukur Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli Tahun 2016 – 2021.

Adapun Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja (LKj) sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinrja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja utama lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja utama;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 3 tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018;
16. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 63 tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018.

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli senantiasa berpedoman pada Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli, dengan uraian sebagai berikut :

1. Tugas pokok : Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

2. Fungsi :
   a. Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan DPRD;
   b. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   c. Penyelenggaraan Rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
   d. Penyediaan dan Pengorganisasian Tenaga Ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan rakyat Daerah.

Sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli, bahwa Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD dengan jabatan struktural Eselon II-b. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretaris DPRD dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Bagian (Kabag) dengan jabatan struktural Eselon III-a yaitu :

1. Kepala Bagian Umum dan Keuangan yang membawahi 2 (dua) Kepala Sub Bagian (Kasubbag) dengan jabatan struktural Eselon IV-a, diantaranya :
   a. Kasubbag Umum
   b. Kasubbag Program dan Keuangan

2. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan yang membawahi 2 (dua) Kepala Sub Bagian (Kasubbag) dengan jabatan struktural Eselon IV-a, diantaranya :
   a. Kasubbag Persidangan, Risalah dan Publikasi
   b. Kasubbag Kajian Perundang-undangan
3. Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan yang membawahi 2 (dua) Kepala Sub Bagian (Kasubbag) dengan jabatan struktural Eselon IV-a, diantaranya :
   a. Kasubbag Fasilitasi Penganggaran
   b. Kasubbag Fasilitasi Pengawasan.

Secara terinci struktur organisasi Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli dapat dilihat pada halaman berikutnya.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI

SEKRETARIS DPRD
MEISONIMAN LAHAGU, SH, M.Si
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19690519 200112 1 002

KABAG. UMUM DAN KEUANGAN
EDISO GEA, SH
PEMBINA TINGKAT I (IV/b)
NIP. 19620915 198110 1 001

KASUBBAG UMUM
IRSAN ZEGA, S.Pd.SD
PENATA (III/c)
NIP. 19761029 200604 1 011

KASUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN
HERYANTO HAREFA, SE
PENATA MUDA TINGKAT I (III/b)
NIP. 19790912 201101 1 003

KABAG. PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN
FAOZARO HULU, SH
PEMBINA TINGKAT I (IV/b)
NIP. 19671111 200212 1 003

KASUBBAG PERSIDANGAN, RISALAH DAN PUBLIKASI
DAVID M.Y. HULU, S.Sos, M.Si
PENATA (III/c)
NIP. 19820113 201001 1 023

KASUBBAG KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN
MARIA DAMAIANTY PASARIBU, SH
PENATA (III/c)
NIP. 19850607 201101 2 004

KABAG. FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN
DUHUMANJAI HALAWA, SH, MH
PEMBINA TINGKAT I (IV/b)
NIP. 19690519 200112 1 002

KASUBBAG FASILITASI PENGANGGARAN
RAHMAD SYUKUR LAOLI, S.Pd, S.AP
PENATA (III/c)
NIP. 19820508 200605 1 001

KASUBBAG FASILITASI PENGAWASAN
YULIUS HULU, S.Pd
PENATA MUDA TINGKAT I (III/b)
NIP. 19850731 201101 1 006

Gunungsitoli, 31 DESEMBER 2018
SEKRETARIS DPRD KOTA GUNUNGSITOLI,

PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI SETWAN

MEISONIMAN LAHAGU, SH, M.Si
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19690519 200112 1 002

Berikut ini akan disajikan data personil Pegawai Negeri Sipil yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli (*keadaan Desember 2018*) :

KEADAAN PEGAWAI SEKRETARIAT
DPRD KOTA GUNUNGSITOLI
TAHUN 2018

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL	PENDIDIKAN TERAKHIR	JABATAN	KET.
1.	MEISONIMAN LAHAGU, SH, M.Si NIP. 19690519 200112 1 002	Pembina (IV/a)	S-2/Adm. Pemerintahan Daerah	Sekretaris DPRD	
2.	FAOZARO HULU, SH NIP. 19671111 200212 1 003	Pembina Tk. I (IV/b)	S-1/Ilmu Hukum	Kabag Persidangan dan Perundang-undangan	
3.	DUHUMANJAI HALAWA, SH, MH NIP. 19660507 200112 1 001	Pembina Tk. I (IV/b)	S-2/Magister Ilmu Hukum	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	
4.	EDISO GEA, SH NIP. 19620915 198110 1 001	Pembina Tk. I (IV/b)	S-1/Ilmu Hukum	Kabag Umum dan Keuangan	
5.	DAVID M.Y HULU, S.Sos, M.Si NIP. 19820113 201001 1 023	Penata (III/c)	S-2/Adm. Pemerintahan Daerah	Kasubbag Persidangan, Risalah dan Publikasi	
6.	MARIA DAMAIANTY PASARIBU, SH NIP. 19850607 201101 2 004	Penata (III/c)	S-1/Ilmu Hukum	Kasubbag Kajian Perundang-undangan	
7.	RAHMAT SYUKUR LAOLI, S.Pd, S.A.P NIP. 19820508 200605 1 001	Penata (III/c)	S-1/Ilmu Administrasi Negara	Kasubbag Fasilitasi Penganggaran	
8.	YULIUS HULU, S.Pd NIP. 19850731 201101 1 006	Penata Muda Tk. I (III/b)	S-1/Pendidikan	Kasubbag Fasilitasi Pengawasan	
9.	IRSAN ZEGA, S.Pd. SD NIP. 19761029 200604 1 011	Penata (III/c)	S-1/Pendidikan	Kasubbag Umum	
10.	HERYANTO HAREFA, SE NIP. 19790912 201101 1 003	Penata Muda Tk. I (III/b)	S-1/Akuntansi	Kasubbag Program dan Keuangan	
11.	NYAKMIN ACEH, SH NIP. 19610410 198101 1 002	Penata Tk. I (III/d)	S-1/Ilmu Hukum	Pelaksana	
12.	BUSRIAL PILIANG, SE NIP. 19780302 200605 1 001	Penata Tingkat I (III/d)	S-1/Akuntansi	Pelaksana	
13.	NIKODEMO DAELI, S.Pd, M.Pd NIP. 19790301 200502 1 001	Penata Tingkat I (III/d)	S-2/Teknologi Pendidikan	Pelaksana	
14.	YULIUS HEVRINSYAH TEL, S.Pd NIP.19800719 201001 1 011	Penata (III/c)	S-1/Pendidikan Bahasa dan Seni	Pelaksana	
15.	NIAARO ZENDRATO, S.Pd NIP. 19850411 201001 1 025	Penata (III/c)	S-1/Pendidikan Biologi	Pelaksana	
16.	SUSANTY VERAWATY HAREFA, SE NIP. 19790906 201001 2 019	Penata (III/c)	S-1/Akuntansi	Pelaksana	
17.	ALFRED SYAHRON GULO, SH NIP. 19820912 201101 1 003	Penata Muda Tk. I (III/b)	S-1/Ilmu Hukum	Pelaksana	
18.	EVERONI CHANDRA TEL, SE NIP. 19821212 201209 1 001	Penata Muda Tk. I (III/b)	S-1/Manajemen	Pelaksana	
19.	SAYANGI MENDROFA, SE NIP. 19751205 201001 2 017	Penata Muda (III/a)	S-1/Manajemen	Pelaksana	
20.	LIBEZARO LASE, SE NIP. 19880322 201001 1 008	Penata Muda (III/a)	S-1/Manajemen	Pelaksana	
21.	HETTY MARTHALENTA TEL., A.Md NIP. 19840605 201001 2 042	Penata Muda (III/a)	D-3/Akuntansi	Pelaksana	
22.	SOKHINIHAOGO BU'ULOLO NIP. 19681005 200605 1 001	Pengatur Tk. I (II/d)	SMA/IPS	Pelaksana	
23.	MERLIN RAHMAN HAREFA NIP. 19840413 200502 1 002	Pengatur Tk. I (II/d)	SMK/Elektro	Pelaksana	
24.	ANTONIUS ZENDRATO, A.Md NIP. 19900130 201503 1 002	Pengatur (II/c)	D-3/Akuntansi	Pelaksana	
25.	YOSUA WARUWU NIP. 19751126 201001 1 014	Pengatur (II/c)	SMEA/Akuntansi	Pelaksana	
26.	ESTETISWATI YULIANA LUAHAMBOWO NIP. 19820707 201212 2 005	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	SMK/Sekretaris	Pelaksana	

1.3. Maksud dan Tujuan

Laporan kinerja Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli ini menjelaskan tentang pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan yang memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja tahun 2018.

Tujuan penyajian laporan kinerja ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perikanan Kota Gunungsitoli untuk meningkatkan kinerjanya.

1.4. Visi dan Misi Perangkat Daerah

Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli telah menetapkan Visi dan Misi sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli tahun 2016 – 2021. Visi Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli berangkat dari pemikiran mengenai nilai-nilai luhur yang dianut dan berkembang dalam masyarakat dan segenap Pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli dan selanjutnya diaplikasikan dalam tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli. Berdasarkan kondisi dan fenomena yang ada, maka nilai-nilai luhur tersebut selanjutnya dinyatakan dalam 3 prinsip yaitu Kerjasama, Ikhlas dan berkualitas.

Berdasarkan prinsip nilai-nilai luhur yang dianut tersebut, kemudian dirumuskan menjadi pernyataan Visi Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli, yaitu :

"Sekretariat DPRD Prima dalam Pelayanannya"

Pernyataan Visi di atas mengandung makna bahwa :

a. Pelayanan Prima (Service Excellence) merupakan pelayanan terbaik yang harus diberikan oleh Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan DPRD sehingga tugas pokok dan fungsi DPRD dapat berjalan dengan baik;
b. Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli harus dapat menyajikan pelayanan Administrasi kepada DPRD Kota Gunungsitoli secara lengkap, cepat, tepat dan akurat;
c. Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli memberikan kontribusi terhadap terwujudnya tata usaha dan tata kelola yang transparan dan akuntabel;

d. Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli berusaha menyediakan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD Kota Gunungsitoli seoptimal mungkin , dan
e. Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli bekerja dengan penuh semangat, ikhlas dan bertanggung jawab.

Untuk mewujudkan pernyataan visi yang telah disepakati dan dirumuskan, Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli melaksanakan 2 (dua) misi, yaitu:

a. Meningkatkan kemandirian Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli dalam melaksanakan tugas.
b. Meningkatkan mutu layanan Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli.

Masing-masing misi yang telah dikemukakan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Misi meningkatkan kemandirian Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli dalam melaksanakan tugas serta memupuk rasa kemandirian dan penuh tanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan bidang tugas yang diemban oleh masing-masing personil.
b. Misi meningkatkan mutu layanan sekretariat DPRD kepada Anggota DPRD Kota Gunungsitoli adalah Sekretariat DPRD senantiasa menyediakan sarana/prasarana pendukung dalam penyelenggaraan tugas-tugas (rapat) DPRD Kota Gunungsitoli.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan adalah suatu proses pencapaian tujuan dalam jangka waktu tertentu melalui pengoptimalisasian pengelolaan berbagai potensi dan sumber-sumber daya organisasi, mempertimbangkan kelemahan, mengidentifikasi peluang serta memperhitungkan tantangan/kendala yang mungkin terjadi. Perencanaan ini mengandung visi, misi dan tujuan serta sasaran yang dikehendaki serta dilanjutkan dengan cara pencapaiannya melalui kebijakan, program dan kegiatan.

2.1. Rencana Strategis Perangkat Daerah

Rencana strategis merupakan bahan dasar pengukuran kinerja instansi pemerintah. Renstra merupakan target/ kebijakan yang telah ditentukan untuk 5 tahun. Selain itu, rencana strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia dan sumber daya lainnya agar mampu memenuhi keinginan stakeholders dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik regional, nasional maupun global.

Analisis terhadap kinerja organisasi baik secara internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategis instansi pemerintah pada umumnya, khususnya Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli.

Sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan dalam jangka waktu menengah maka Sekretariat DPRD menyusun Renstra 2016-2021 sesuai dengan yang diamanatkan dalam peraturan maupun perundang-undangan. Tujuan dari penyusunan Renstra itu sendiri ialah sebagai acuan pelaksanaan kebijakan dan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat DPRD. Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli untuk tahun 2016 – 2021 yaitu: **Sekretariat DPRD Prima dalam Pelayanannya**.

Untuk mencapai visi maka ditetapkan 2 (dua) misi sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

a. Meningkatkan kemandirian Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli dalam melaksanakan tugas.
b. Meningkatkan mutu layanan Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli.

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi, maka Visi dan Misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) dan Sasaran Strategis yang harus dicapai sebagai berikut :

Tujuan I : Meningkatkan Perencanaan Anggaran Keuangan Sekretariat DPRD dan DPRD	
Sasaran	**Indikator Kinerja Utama**
Tersedianya hak – hak keuangan DPRD Kota Gunungsitoli	Persentase hak – hak keuangan DPRD Kota Gunungsitoli

Adapun program utama yang mendukung pencapaian kinerja sasaran ini yaitu : Program Optimalisasi Kinerja Keuangan Sekretariat DPRD dan DPRD yang diimplementasikan melalui beberapa kegiatan antara lain :

1. Pembayaran tunjangan Reses
2. Pembayaran tunjangan komunikatif insentif
3. Pembayaran tunjangan perumahan (belanja rumah tangga)
4. Pembayaran tunjangan transportasi

Tujuan II : Meningkatkan Kinerja Legislatif yang Optimal	
Sasaran	**Indikator Kinerja Utama**
Terfasilitasinya rapat – rapat DPRD Kota Gunungsitoli	Persentase rapat – rapat DPRD Kota Gunungsitoli

Adapun program utama yang mendukung pencapaian target kinerja sasaran ini adalah : Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah diimplementasikan melalui beberapa kegiatan, yaitu :

1. Pelaksanaan Rapat – rapat Paripurna Istimewa;
2. Pelaksanaan Rapat – rapat Fraksi
3. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif
4. Penyediaan Buku Risalah – risalah Rapat dan Perda Kota Gunungsitoli;
5. Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD Kota Gunungsitoli.
6. Rapat Kerja DPRD Kota Gunungsitoli

Tujuan 01 : Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendukung Penyelenggaraan Tugas – Tugas DPRD	
Sasaran	**Indikator Kinerja Utama**
Tersedianya instrumen penunjang kegiatan DPRD Kota Gunungsitoli	Persentase instrumen penunjang kegiatan DPRD Kota Gunungsitoli
Tersedianya tenaga ahli fraksi	Persentase ketersediaan tenaga ahli fraksi

Adapun program utama yang mendukung pencapaian target kinerja sasaran ini yaitu :

1. Program perencanaan dan pengawasan DPRD melalui kegiatan :
   a. Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah Dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama;
   b. Pelaksanaan Reses;
   c. Pelaksanaan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah;
   d. Pelaksanaan Rapat Kerja Panitia Khusus (PANSUS) DPRD Kota Gunungsitoli;
   e. Pelaksanaan Rapat Kerja Komisi – komisi DPRD Kota Gunungsitoli;
   f. Pengadaan Pakaian Dinas DPRD;
   g. Pelaksanaan Ramah Tamah DPRD Kota Gunungsitoli.

2. Program Kerjasama informasi dan Media Massa melalui kegiatan :
   a. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

2.2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli telah merumuskan Indikator Kinerja Sasaran Renstra serta telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator utama dalam menentukan keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi. Penetapan IKU bertujuan untuk memudahkan pemangku kepentingan dalam mengukur tingkat keberhasilan kinerja Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli. Berikut ini merupakan Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli tahun 2016 – 2021.

Tabel 2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli Tahun 2016 – 2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN
(1)	(2)	(3)
1. Terfasilitasinya rapat – rapat DPRD Kota Gunungsitoli	Persentase rapat – rapat DPRD Kota Gunungsitoli	$\frac{\textit{Jumlah rapat yang terlaksana pada tahun berkenan}}{\textit{Jumlah rapat yang terjadwalkan pada tahun berkenan}} X\ 100\ \%$
2. Tersedianya hak – hak keuangan DPRD Kota Gunungsitoli	Persentase hak – hak keuangan DPRD Kota Gunungsitoli	$\frac{\textit{Jenis – Jenis hak keuangan yang terealisasi pada tahun berkenan}}{\textit{Jenis – Jenis hak keuangan yang direncanakan pada tahun berkenan}} X\ 100$
3. Tersedianya instrumen penunjang kegiatan DPRD Kota Gunungsitoli	Persentase instrumen penunjang kegiatan DPRD Kota Gunungsitoli	$\frac{\textit{Instrumen penunjang kegiatan DPRD yang terealisasi pada tahun berkenan}}{\textit{Instrumen penunjang kegiatan DPRD yang direncanakan pada tahun berkenan}} X\ 100\ \%$
4. Tersedianya tenaga ahli fraksi	Persentase ketersediaan tenaga ahli fraksi	$\frac{\textit{Jumlah tenaga ahli fraksi yang tersedia pada tahun berkenan}}{\textit{Jumlah tenaga ahli fraksi yang dibutuhkan pada tahun berkenan}} X\ 100\ \%$

2.3. Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2018

Dalam upaya mewujudkan target kinerja, Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli membuat satu kesepakatan dengan memperjanjikannya dalam penetapan kinerja. Penetapan kinerja adalah suatu dokumen pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja / perjanjian kerja antara atasan (Kepala Daerah) dan bawahan (Pimpinan SKPD) untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi tersebut. Adapun guna penetapan kinerja adalah :

1. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi;
2. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan Kinerja instansi pemerintah; dan
3. Menilai keberhasilan organisasi.

Tujuan khusus ditetapkan Perjanjian Kinerja antara lain: meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan

tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya berbasis pada Renstra Perangkat Daerah 2016 – 2021 Perjanjian Kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2018.

Berikut terlampir Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2018

PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
SEKRETARIAT DPRD
Jln. Gomo No. 37, Telp/Fax (0639) 22302 Kode Pos 22815
GUNUNGSITOLI

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a	: **MEISONIMAN LAHAGU, SH, M.Si**
NIP	: 19690519 200112 1 002
Jabatan	: Plt. Sekretaris DPRD Kota Gunungsitoli

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

N a m a	: **Ir. LAKHOMIZARO ZEBUA**
Jabatan	: Walikota Gunungsitoli

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gunungsitoli, 10 Januari 2018

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
Ir. LAKHOMIZARO ZEBUA	**MEISONIMAN LAHAGU, SH, M.Si** Pembina (IV/a) 19690519 200112 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
PERANGKAT DAERAH

SEKRETARIAT DPRD KOTA GUNUNGSITOLI

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN		KETERANGAN
I	**Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran**			**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			
1		Terpenuhinya kebutuhan akan pelayanan surat-menyurat	1 Tahun	Penyediaan jasa surat menyurat	Rp	6.750.000	DAU - 2018
2		Terpenuhinya kebutuhan akan pelayanan komurikasi, sumber daya air, listrik, faksimili dan retribusi sampah	5 Jenis	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp	196.603.632	DAU - 2018
3		Terwujudnya pembayaran perizinan kendaraan dinas/operaional	13 Unit	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Rp	8.600.000	DAU - 2018
4		Tersedianya honorarium tenaga pendukung (petugas kebersihan kantor)	15 Orang	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp	320.400.000	DAU - 2018
5		Tersedianya alat tulis kantor	1 Tahun	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp	76.168.640	DAU - 2018
6		Tersedianya biaya cetak dan penggandaan	1 Tahun	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp	80.285.960	DAU - 2018
7		Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	1 Tahun	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp	15.279.225	DAU - 2018
8		Meningkatnya pengetahuan aparatur sipil negara dan DPRD tentang peraturan perundang-undangan	1 Tahun	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp	4.860.000	DAU - 2018
9		Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman harian DPRD, rapat dan tamu	1 Tahun	Penyediaan makanan dan minuman	Rp	324.126.000	DAU - 2018
10		Terwujudnya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi/konsultasi serta pendampingan DPRD keluar daerah	1 Tahun	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp	450.000.000	DAU - 2018
11		Terwujudnya pelaksanaan monitoring/survey/pengawasan/rapat koordinasi/konsultasi serta pendampingan DPRD dalam daerah	1 Tahun	Monitoring/survey/pendataan/pengawasan/evaluasi/rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	Rp	81.900.000	DAU - 2018
12		Tersedianya honorarium pejabat/staf pengelola keuangan	18 Orang	Penyediaan Jasa Administrasi Umum	Rp	187.046.000	DAU - 2018

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
13		Tersedianya honorarium tenaga pendukung supir	1 Orang	Penyediaan Jasa Supir/Kernet/Operator Alat Berat	Rp 22.800.000	DAU - 2018
14		Tersedianya peralatan kebersihan kantor	1 Tahun	Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor	Rp 29.844.640	DAU - 2018
15		Tersedianya honorarium tenaga pendukung tenaga ahli fraksi DPRD	5 Orang	Penyediaan Jasa Tenaga Ahli dan Sekretariat Fraksi	Rp 150.000.000	DAU - 2018
16		Terpenuhinya pembayaran Iuran ADEKSI (Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia)	1 Tahun	Penyediaan Iuran Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia	Rp 20.000.000	DAU - 2018
17		Terpenuhinya Iuran ASDEKSI (Asosiasi Sektretrariat DPRD kota Seluruh Indonesia)	1 Tahun	Penyediaan Iuran Asosiasi Sekretariat DPRD (ASDEKSI) Kota Gunungsitoli	Rp 12.000.000	DAU - 2018
18		Terwujudnya pemeriksaan kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD	25 Orang	Penyediaan Biaya General Check up Pimpinan dan Anggota DPRD	Rp 100.000.000	DAU - 2018
19		Terpenuhinya Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD	3 Orang	Penyediaan Belanja Rumah Tangga Rumah Jabatan Pimpinan DPRD	Rp 1.049.540.780	DAU - 2018
II	**Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana kantor Sekretariat DPRD, DPRD dan Rumah Jabatan/Dinas Pimpinan DPRD**			**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**		
1		Tersedianya sarana meubelair kantor	6 Jenis	Pengadaan Meubelair	Rp 113.218.000	DAU - 2018
2		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	14 Jenis	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Rp 197.798.500	DAU - 2018
3		Tersedianya biaya sewa rumah dinas jabatan Pimpinan (Ketua) DPRD	1 Unit	Penyediaan Sewa Rumah Jabatan/Dinas	Rp 100.000.000	DAU - 2018
4		Terawatnya gedung kantor DPRD dan Sekretariat DPRD	1 Tahun	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Rp 49.981.000	DAU - 2018
5		Terawatnya kendaraan dinas RODA 2 dan Roda 4	13 Unit	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Rp 77.870.000	DAU - 2018
6		Terawatnya perlengkapan gedung kantor	1 Tahun	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Rp 50.250.000	DAU - 2018
7		Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas-tugas kantor	3 Unit	Pembangunan Pos Jaga	Rp 45.000.000	DAU - 2018
III	**Meningkatnya kinerja sumber daya aparatur (PNS) dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan**			**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		
1		Meningkatnya pengetahuan dan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	1 Tahun	Mengikuti Diklat Bimtek/Workshop/Pelatihan/Kursus/Sosialisasi	Rp 84.000.000	DAU - 2018

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
IV	**Tercapainya penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah**			**Program Kerjasama Informasi dan Media Massa**		
1		Terlaksananya penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui media massa	1 Tahun	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Rp 16.875.000	DAU - 2018
V	**Tercapainya peningkatan kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat**			**Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah**		
1		Terwujudnya Penyampaian program-program Lembaga Perwakilan Rakyat	1 Tahun	Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah Dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	Rp 33.932.920	DAU - 2018
2		Terwujudnya pelaksanaan Rapat-rapat Paripurna Istimewa	1 Tahun	Rapat-Rapat Paripurna Istimwewa	Rp 54.881.360	DAU - 2018
3		Terlaksananya kegiatan reses Pimpinan dan Anggota DPRD	3 Kali	Kegiatan Reses	Rp 1.379.372.400	DAU - 2018
4		Tercapainya kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah	1 Tahun	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	Rp 199.500.000	DAU - 2018
5		Meningkatnya kinerja sumber daya Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Gunungsitoli dalam melaksanakan tugas-tugas DPRD	1 Tahun	Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD	Rp 1.832.500.000	DAU - 2018
6		Terlaksananya kegiatan kerja Panitia Khusus (PANSUS) DPRD	1 Tahun	Kerja Panitia Khusus (PANSUS) DPRD Kota Gunungsitoli	Rp 1.114.541.840	DAU - 2018
7		Tercapainya peningkatan kinerja Badan-Badan DPRD	1 Tahun	Kerja Badan-Badan DPRD Kota Gunungsitoli	Rp 1.082.271.950	DAU - 2018
8		Terwujudnya peningkatan kinerja Komisi-Komisi DPRD	1 Tahun	Kerja Komisi-komisi DPRD Kota Gunungsitoli	Rp 1.089.237.670	DAU - 2018
9		Terdokumentasinya risalah-risalah rapat DPRD dan peraturan daerah Kota Gunungsitoli	300 Buku	Penyediaan buku Risalah-risalah Rapat dan Perda Kota Gunungsitoli	Rp 30.000.000	DAU - 2018
10		Terlaksananya pengambilan keputusan oleh rapat-rapat fraksi DPRD Kota Gunungsitoli	1 Tahun	Pelaksanaan Rapat-rapat Fraksi	Rp 35.587.480	DAU - 2018
11		Terlaksananya Rapat-rapat Kerja DPRD	1 Tahun	Rapat Kerja DPRD Kota Gunugsitoli	Rp 41.507.470	DAU - 2018
12		Terbitnya peraturan daerah (perda) inisiatif DPRD	1 Tahun	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif	Rp 280.022.040	DAU - 2018

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
13		Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD	1 Tahun	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah pimpinan dan alat kelengkapan DPRD Kota Gunungsitoli	Rp 952.800.000	DAU - 2018
14		Terlaksananya penyediaan pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD	150 Stel	Pengadaan Pakaian Dinas	Rp 317.800.000	DAU - 2018
				TOTAL	Rp 12.315.152.507	

Gunungsitoli, 10 Januari 2018
KEPALA PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIAT DPRD KOTA GUNUNGSITOLI,

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

Ir. LAKHOMIZARO ZEBUA

MEISONIMAN LAHAGU, SH, M.Si
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19690519 200112 1 002

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2018 sebagai Acuan Penilaian Kinerja.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.	Terfasilitasinya rapat – rapat DPRD Kota Gunungsitoli	Jumlah rapat yang terlaksana	400 Kali
		Jumlah Penetapan Ranperda menjadi Perda oleh DPRD	16 Perda
2.	Tersedianya instrument penunjang kegiatan DPRD Kota Gunungstioli	Jumlah ragam penunjang kegiatan DPRD	10 Kegiatan

2.4. Cascading (Pohon Kinerja) Perangkat Daerah Tahun 2018

Untuk menggambarkan keterkaitan antara tujuan, sasaran, program dan kegiatan maka dituangkan dalam pohon kinerja berikut ini:

CASCADING SEKRETARIAT DPRD KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2018

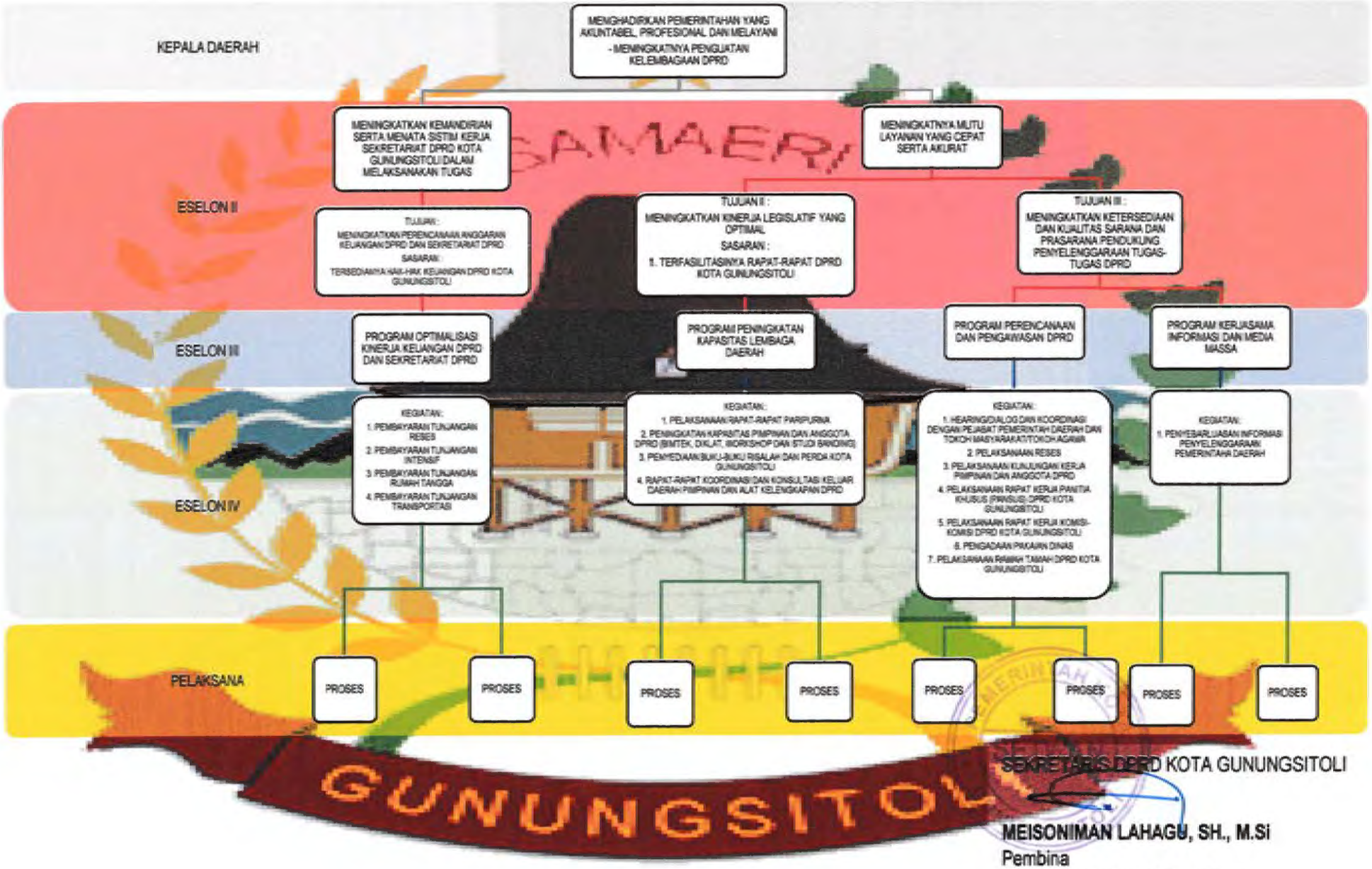

SEKRETARIS DPRD KOTA GUNUNGSITOLI

MEISONIMAN LAHAGU, SH., M.Si
Pembina
NIP. 19690519 200112 1 002

2.5. Rencana Aksi Perangkat Daerah Tahun 2018

Berikut terlampir Rencana Aksi Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli Tahun 2018 pada lampiran – 2 laporan ini:

PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
SEKRETARIAT DPRD
Jalan Gomo No. 37 Telp. (0639) 22302 Fax. (0639) 22302 Kode Pos 22815
GUNUNGSITOLI

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT DPRD KOTA GUNUNGSITOLI

(Dalam Rupiah)

SASARAN				KEGIATAN					REALISASI		KET
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	SATUAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)		(10)
Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pemerintah Kota Gunungsitoli	Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pemerintah	TW 1 : 1.089.161.398 TW 2 : 800.150.798 TW 3 : 897.415.538 TW 4 : 688.477.143	Program Pelayanan Administrasi Kantor	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya kebutuhan akan pelayanan surat menyurat	6.750.000	TW 1 :	1.674.000	TW 1 :	-	
							TW 2 :	1.674.000	TW 2 :	1.674.000	
							TW 3 :	1.674.000	TW 3 :	1.674.000	
							TW 4 :	1.728.000	TW 4 :	-	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan akan pelayanan pelayanan komunikasi, sumber daya air, listrik, faksimili dan retribusi sampah	203.094.832	TW 1 :	55.642.108	TW 1 :	-	
							TW 2 :	49.150.908	TW 2 :	39.980.643	
							TW 3 :	49.150.908	TW 3 :	26.725.297	
							TW 4 :	49.150.908	TW 4 :	-	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terwujudnya pembayaran perizinan kendaraan dinas/operasional	8.600.000	TW 1 :	8.600.000	TW 1 :	-	
							TW 2 :	-	TW 2 :	-	
							TW 3 :	-	TW 3 :	-	
							TW 4 :	-	TW 4 :	-	
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya honorarium tenaga pendukung (petugas kebersihan kantor)	539.444.800	TW 1 :	134.894.800	TW 1 :	-	
							TW 2 :	134.850.000	TW 2 :	224.750.000	
							TW 3 :	134.850.000	TW 3 :	134.850.000	
							TW 4 :	134.850.000	TW 4 :	-	
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	76.034.240	TW 1 :	20.382.480	TW 1 :	-	
							TW 2 :	17.366.320	TW 2 :	26.297.000	
							TW 3 :	19.891.920	TW 3 :	5.717.050	
							TW 4 :	18.393.520	TW 4 :	-	

Penyediaan Belanja Rumah Tangga Rumah Jabatan Pimpinan DPRD	Terpenuhinya belanja rumah tangga pimpinan DPRD	1.049.540.780	TW 1 :	265.266.340	TW 1 :	-	
			TW 2 :	260.719.140	TW 2 :	-	
			TW 3 :	262.337.540	TW 3 :	-	
			TW 4 :	261.217.760	TW 4 :	-	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya biaya cetak dan penggandaan	80.285.960	TW 1 :	24.872.400	TW 1 :	-	
			TW 2 :	16.922.400	TW 2 :	21.131.880	
			TW 3 :	21.472.400	TW 3 :	5.089.700	
			TW 4 :	17.018.760	TW 4 :	-	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	15.279.225	TW 1 :	5.504.910	TW 1 :	-	
			TW 2 :	2.480.910	TW 2 :	-	
			TW 3 :	5.042.910	TW 3 :	-	
			TW 4 :	2.250.495	TW 4 :	-	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya pengetahuan aparatur sipil negara dan DPRD tentang peraturan dan perundang-undangan	4.860.000	TW 1 :	4.860.000	TW 1 :	-	
			TW 2 :	-	TW 2 :	-	
			TW 3 :	-	TW 3 :	-	
			TW 4 :	-	TW 4 :	-	
Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman harian DPRD, rapat dan tamu	387.634.800	TW 1 :	98.589.300	TW 1 :	-	
			TW 2 :	98.589.300	TW 2 :	47.057.800	
			TW 3 :	98.589.300	TW 3 :	55.320.500	
			TW 4 :	91.866.900	TW 4 :	-	
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terwujudnya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi/konsultasi serta pendampingan DPRD ke luar daerah	500.000.000	TW 1 :	315.000.000	TW 1 :	-	
			TW 2 :	-	TW 2 :	286.766.788	
			TW 3 :	185.000.000	TW 3 :	82.501.400	
			TW 4 :	-	TW 4 :	-	
Monitoring/Survey/Pendataan/Pengawasan/Evaluasi/Rapat Koordinasi dan Konsultasi Di Dalam Daerah	Terwujudnya pelaksanaan monitoring/survey/pengawasan/rapat koordinasi/konsultasi serta pendampingan DPRD dalam daerah	81.900.000	TW 1 :	21.900.000	TW 1 :	-	
			TW 2 :	21.900.000	TW 2 :	-	
			TW 3 :	21.900.000	TW 3 :	-	
			TW 4 :	16.200.000	TW 4 :	-	
Penyediaan Jasa Administrasi Umum	Tersedianya honorarium pejabat/staf pengelola keuangan	187.046.000	TW 1 :	48.318.500	TW 1 :	-	
			TW 2 :	46.747.500	TW 2 :	-	
			TW 3 :	45.990.000	TW 3 :	-	
			TW 4 :	45.990.000	TW 4 :	-	

				Penyediaan Jasa Supir/Kernet/Operator Alat Berat	Tersedianya honorarium tenaga pendukung supir	22.844.800	TW 1 :	5.744.800	TW 1 :	-	
							TW 2 :	5.700.000	TW 2 :	9.500.000	
							TW 3 :	5.700.000	TW 3 :	5.700.000	
							TW 4 :	5.700.000	TW 4 :	-	
				Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor	Tersedianya peralatan kebersihan kantor	29.844.640	TW 1 :	8.366.960	TW 1 :	-	
							TW 2 :	6.550.320	TW 2 :	11.513.650	
							TW 3 :	8.316.560	TW 3 :	-	
							TW 4 :	6.610.800	TW 4 :	-	
				Penyediaan Jasa Tenaga Ahli dan Sekretariat Fraksi	Tersedianya honorarium tenaga pendukung tenaga ahli fraksi DPRD	150.044.800	TW 1 :	37.544.800	TW 1 :	-	
							TW 2 :	37.500.000	TW 2 :	62.500.000	
							TW 3 :	37.500.000	TW 3 :	37.500.000	
							TW 4 :	37.500.000	TW 4 :	-	
				Penyediaan Iuran Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia	Terpenuhinya pembayaran Iuran ADEKSI (Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia)	20.000.000	TW 1 :	20.000.000	TW 1 :	-	
							TW 2 :	-	TW 2 :	-	
							TW 3 :	-	TW 3 :	-	
							TW 4 :	-	TW 4 :	-	
				Penyediaan Iuran Asosiasi Sekretariat DPRD Kota Seluruh Indonesia	Terpenuhinya pembayaran Iuran ASDEKSI (Asosiasi Sekretariat DPRD Kota Seluruh Indonesia)	12.000.000	TW 1 :	12.000.000	TW 1 :	-	
							TW 2 :	-	TW 2 :	-	
							TW 3 :	-	TW 3 :	-	
							TW 4 :	-	TW 4 :	-	
				Penyediaan Biaya General Check Up Pimpinan dan Anggota DPRD	Terwujudnya pemeriksaan kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD	100.000.000	TW 1 :	-	TW 1 :	-	
							TW 2 :	100.000.000	TW 2 :	-	
							TW 3 :	-	TW 3 :	10.724.200	
							TW 4 :	-	TW 4 :	-	
		TW 1 : 3.930.874.245 TW 2 : 2.626.185.915 TW 3 : 556.153.865 TW 4 : 134.604.095	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Meubelair	Tersedianya sarana meubelair kantor	113.218.000	TW 1 :	113.218.000	TW 1 :	-	
							TW 2 :	-	TW 2 :	-	
							TW 3 :	-	TW 3 :	-	
							TW 4 :	-	TW 4 :	-	
				Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor	197.798.500	TW 1 :	197.798.500	TW 1 :	-	
							TW 2 :	-	TW 2 :	-	
							TW 3 :	-	TW 3 :	-	
							TW 4 :	-	TW 4 :	-	
				Pemeliharaan Sewa Rumah Jabatan/Dinas	Tersedianya biaya sewa rumah dinas jabatan Pimpinan (Ketua) DPRD	100.000.000	TW 1 :	100.000.000	TW 1 :	-	
							TW 2 :	-	TW 2 :	-	
							TW 3 :	-	TW 3 :	-	
							TW 4 :	-	TW 4 :	-	

				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terawatnya gedung kantor DPRD dan Sekretariat DPRD	49.981.000	TW 1 :	49.981.000	TW 1 :	-
							TW 2 :	-	TW 2 :	-
							TW 3 :	-	TW 3 :	-
							TW 4 :	-	TW 4 :	-
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terawatnya kendaraan dinas roda 2 dan roda 4	77.870.000	TW 1 :	19.467.500	TW 1 :	-
							TW 2 :	19.467.500	TW 2 :	-
							TW 3 :	19.467.500	TW 3 :	-
							TW 4 :	19.467.500	TW 4 :	-
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terawatnya perlengkapan gedung kantor	50.250.000	TW 1 :	47.750.000	TW 1 :	-
							TW 2 :	-	TW 2 :	-
							TW 3 :	2.500.000	TW 3 :	-
							TW 4 :	-	TW 4 :	-
				Pembangunan Pos Jaga	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas-tugas kantor	45.000.000	TW 1 :	-	TW 1 :	-
							TW 2 :	45.000.000	TW 2 :	-
							TW 3 :	-	TW 3 :	-
							TW 4 :	-	TW 4 :	-
		TW 1 : 60.000.000 TW 2 : - TW 3 : 60.000.000 TW 4 : -	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Mengikuti Diklat/Bimtek/Workshop/ Pelatihan/Kursus/Sosialisasi	Meningkatnya pengetahuan dan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	120.000.000	TW 1 :	60.000.000	TW 1 :	-
							TW 2 :	-	TW 2 :	9.105.000
							TW 3 :	60.000.000	TW 3 :	39.575.400
							TW 4 :	-	TW 4 :	-
		TW 1 : 4.125.000 TW 2 : 4.125.000 TW 3 : 4.125.000 TW 4 : 4.500.000	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Terlaksananya penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui media massa	16.875.000	TW 1 :	4.125.000	TW 1 :	-
							TW 2 :	4.125.000	TW 2 :	-
							TW 3 :	4.125.000	TW 3 :	-
							TW 4 :	4.500.000	TW 4 :	-
Meningkatnya Penguatan Kelembagaan DPRD	Cakupan Penguatan Kelembagaan DPRD	TW 1 : 3.973.934.245 TW 2 : 3.385.421.315 TW 3 : 557.455.505 TW 4 : 152.144.065	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	Terwujudnya penyampaian program-program Lembaga Perwakilan Rakyat	33.932.920	TW 1 :	11.368.280	TW 1 :	-
							TW 2 :	11.283.160	TW 2 :	-
							TW 3 :	11.281.480	TW 3 :	-
							TW 4 :	-	TW 4 :	-
				Rapat-rapat Paripurna Istimewa	Terwujudnya pelaksanaan Rapa-rapat Paripurna Istimewa	54.881.360	TW 1 :	20.869.360	TW 1 :	-
							TW 2 :	-	TW 2 :	16.988.000
							TW 3 :	20.754.000	TW 3 :	-
							TW 4 :	13.258.000	TW 4 :	-

Kegiatan Reses	Terlaksananya kegiatan reses Pimpinan dan Anggota DPRD	1.004.372.400	TW 1 :	349.388.880	TW 1 :	-	
			TW 2 :	349.388.880	TW 2 :	263.496.880	
			TW 3 :	305.594.640	TW 3 :	17.656.600	
			TW 4 :	-	TW 4 :	-	
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	Tercapainya kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah	199.500.000	TW 1 :	49.875.000	TW 1 :	-	
			TW 2 :	49.875.000	TW 2 :	-	
			TW 3 :	49.875.000	TW 3 :	-	
			TW 4 :	49.875.000	TW 4 :	-	
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Meningkatnya kinerja sumber daya Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Gunungsitoli dalam melaksanakan tugas-tugas DPRD	1.832.500.000	TW 1 :	1.295.250.000	TW 1 :	-	
			TW 2 :	537.250.000	TW 2 :	853.749.775	
			TW 3 :	-	TW 3 :	644.421.988	
			TW 4 :	-	TW 4 :	-	
Kerja Panitia Khusus (PANSUS) DPRD Kota Gunungsitoli	Terlaksananya kegiatan kerja Panitia Khusus (PANSUS) DPRD	1.114.541.840	TW 1 :	536.921.495	TW 1 :	207.724.000	
			TW 2 :	536.317.815	TW 2 :	409.550.719	
			TW 3 :	28.817.815	TW 3 :	74.759.500	
			TW 4 :	12.484.715	TW 4 :	-	
Kerja Badan-badan DPRD Kota Gunungsitoli	Tercapainya peningkatan kinerja Badan-badan DPRD	1.082.271.950	TW 1 :	526.676.135	TW 1 :	244.802.489	
			TW 2 :	525.889.600	TW 2 :	531.106.980	
			TW 3 :	19.536.775	TW 3 :	35.844.600	
			TW 4 :	10.169.440	TW 4 :	-	
Kerja Komisi-komisi DPRD Kota Gunungsitoli	Terwujudnya peningkatan kinerja Komisi-komisi DPRD	1.089.237.670	TW 1 :	531.634.775	TW 1 :	258.304.538	
			TW 2 :	530.980.400	TW 2 :	569.519.847	
			TW 3 :	17.646.855	TW 3 :	57.439.700	
			TW 4 :	8.975.640	TW 4 :	-	
Penyediaan Buku Risalah-risalah Rapat dan Perda Kota Gunungsitoli	Terdokumentasinya risalah-risalah rapat DPRD dan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli	30.000.000	TW 1 :	7.500.000	TW 1 :	-	
			TW 2 :	7.500.000	TW 2 :	-	
			TW 3 :	7.500.000	TW 3 :	-	
			TW 4 :	7.500.000	TW 4 :	-	
Pelaksanaan Rapat-rapat Fraksi	Terlaksananya pengambilan keputusan oleh rapat-rapat fraksi DPRD Kota Gunungsitoli	35.587.480	TW 1 :	9.050.320	TW 1 :	-	
			TW 2 :	9.108.560	TW 2 :	-	
			TW 3 :	9.054.800	TW 3 :	-	
			TW 4 :	8.373.800	TW 4 :	-	

				Rapat Kerja DPRD Kota Gunungsitoli	Terlaksananya Rapat-rapat Kerja DPRD	41.507.470	TW 1 :	-	TW 1 :	-	
							TW 2 :	-	TW 2 :	-	
							TW 3 :	-	TW 3 :	-	
							TW 4 :	41.507.470	TW 4 :	-	
				Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif	Terbitnya Peraturan Daerah (PERDA) Inisiatif DPRD	280.022.040	TW 1 :	-	TW 1 :	-	
							TW 2 :	192.627.900	TW 2 :	25.474.612	
							TW 3 :	87.394.140	TW 3 :	23.504.200	
							TW 4 :	-	TW 4 :	-	
				Pengadaan Pakaian Dinas	Terlaksananya penyediaan pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD	317.800.000	TW 1 :	317.800.000	TW 1 :	-	
							TW 2 :	-	TW 2 :	-	
							TW 3 :	-	TW 3 :	-	
							TW 4 :	-	TW 4 :	-	
				Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD Kota Gunungsitoli	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD	952.800.000	TW 1 :	317.600.000	TW 1 :	284.995.562	
							TW 2 :	635.200.000	TW 2 :	449.169.339	
							TW 3 :	-	TW 3 :	117.133.742	
							TW 4 :	-	TW 4 :	-	

Gunungsitoli, 23 Oktober 2018
Sekretaris DPRD Kota Gunungsitoli,

PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI SETWAN

MEISONIMAN LAHAGU, SH, M.Si
PEMBINA
NIP. 19690519 200112 1 002

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Sedangkankinerja adalah gambaran mengenai pencapaian pelaksanaan kegiatan, program dan kegiatan dalam rangka upaya mewujudkan tujuandan sasaran berdasarkan visi dan misi.

Laporan akuntabilitas kinerja meliputi dokumen yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja yaitu pertangungjawabkan kinerja instansi pemerintah dalam mencapai tujuan / sasaran strategis instansi pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga dengan memperhatikan beberapa hal yang dipertimbangkan, yakni :

1. Masukan (input) yaitu segala sesuatu sumber daya/potensi yang dibutuhkan dalam pelaksanakan kegiatan.
2. Keluaran (output) yaitu bentuk nyata yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan, baik dalam bentuk fisik maupun non fisik.
3. Hasil (outcome) yaitu sesuatu yang dihasilkan sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan, baik hasil dalam jangka pendek maupun hasil dalam jangka panjang.
4. Manfaat (benefit) yaitu manfaat yang diharapkan dari pelaksaan kegiatan baik manfaat langsung maupun manfaat tidak langsung.
5. Dampak (impact) yaitu akibat yang ditimbulkan atas pelaksanaan kegiatan baik dampak positif maupun dampak negatif.

3.1. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2018

Untuk capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli, dapat dilaksanakan dengan cara melakukan pengukuran kinerja organisasi. program dan kewajiban dengan nilai dan bobot sebagai berikut :

Hasil pelaksanaan (%)	Bobot
76-100	Sangat baik
51-75	Baik
26-50	Kurang
01-25	Sangat kurang

Untuk mengetahui secara jelas hasil capai kinerja Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli Tahun 2018, maka berikut ini disajikan hasil capai kinerja tersebut sebagai berikut :

Tabel 3.1. Data Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2018.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.	Terfasilitasinya rapat – rapat DPRD Kota Gunungsitoli	Jumlah rapat yang terlaksana	650 Kali	397 Kali	61,08
		Jumlah Penetapan Ranperda menjadi Perda oleh DPRD	16 Perda	9 Perda	56,25
2.	Tersedianya instrument penunjang kegiatan DPRD Kota Gunungstioli	Jumlah ragam penunjang kegiatan DPRD	10 Kegiatan	10 Kegiatan	100

3.2. Analisis Capaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2018

Mengacu pada hasil pengukuran kinerja sebagaimana tecantum dalam Tabel 3.1 dapat dijelaskan terkait capaian masing-masing indikator kinerja sebagai berikut :

1. Rapat yang terlaksana

   Kegiatan rapat DPRD yang terlaksana selama kurun waktu 12 bulan (bulan Januari sampai dengan Desember) Tahun 2018, diantaranya :

NO	INDIKATOR KERJA	HASIL CAPAI			KET.
		THN 2017	THN 2018	SATUAN	
1	Rapat Paripurna	64	50	kali	
2	Rapat Pimpinan DPRD	5	4	kali	
3	Rapat Paripurna Istimewa	2	2	kali	
4	Rapat Komisi	90	78	kali	

5	Rapat Badan Musyawarah	20	20	kali	
6	Rapat Badan Anggaran	54	90	kali	
7	Rapat Badan Legislasi	19	15	kali	
8	Rapat Badan Kehormatan	12	12	kali	
9	Rapat Panitia Khusus (Pansus)	52	40	kali	
10	Rapat Kerja DPRD	1	1	kali	
11	Rapat Fraksi	93	85	kali	
Jumlah		412	397	kali	

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi kegiatan rapat DPRD menurun sebanyak **397 kali** dari yang ditargetkan **650 kali** dengan persentase capaian sebesar **61,08%** (Bobot : **Baik**). Dibandingkan dengan tahun yang lalu (2017) realisasi kegiatan rapat DPRD sebanyak **412 kali** dari yang ditargetkan **778 kali**. Selisih capaian (dari tahun 2018 s/d 2017) meningkat **8,12%**. Hal ini disebabkan oleh :

a. Rapat terlaksana sesuai dengan kebutuhan DPRD;
b. Rapat terlaksana ketika bahan Ranperda yang disampaikan baik inisiatif Pemko maupun DPRD telah diserahkan untuk dibahas di ruang paripurna.

2. Penetapan Ranperda menjadi Perda oleh DPRD Kota Gunungsitoli Tahun 2018, diantaranya :

NO.	JENIS RANPERDA	KETERANGAN
1.	Ranperda tentang Pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan dan Pembentukan Perangkat Desa	Sudah menjadi Perda
2.	Ranperda tentang Pinjaman Daerah untuk Pembangunan Pasar Nou dan Prasarana Lainnya	Sudah menjadi Perda
3.	Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan	Sudah menjadi Perda
4.	Ranperda tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Sudah menjadi Perda
5.	Ranperda tentang Perubahan Atas Perda No. 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha	Sudah menjadi Perda
6.	Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Sudah menjadi Perda

	Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2017	
7.	Ranperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Belum menjadi Perda
8.	Ranperda tentang Perubahan APBD Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018	Sudah menjadi Perda
9.	Ranperda tentang Rencana Detail Tata Ruang	Belum menjadi Perda
10.	Ranperda tentang Perlindungan Penyandang Disabilitasi	Belum menjadi Perda
11.	Ranperda tentang Hari Jadi Pemerintah Kota Gunungsitoli	Belum menjadi Perda
12.	Ranperda tentang Retribusi IMB	Sudah menjadi Perda
13.	Ranperda tentang Ketenagakerjaan	Belum menjadi Perda
14.	Ranperda tentang Penyalahgunaan Narkoba	Belum menjadi Perda
15.	Ranperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan	Belum menjadi Perda
16.	Ranperda tentang APBD Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2019	Sudah menjadi Perda

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah Ranperda Kota Gunungsitoli yang diusulkan untuk tahun 2018 sebanyak **16 Ranperda**, akan tetapi hanya **9** yang menjadi Perda Kota Gunungsitoli dengan persentase capaian **56,25%** (Bobot : **Baik**). Dibanding dengan tahun 2017 bahwa jumlah Ranperda Kota Gunungsitoli yang diusulkan sebanyak **24 Ranperda**, tetapi yang menjadi Perda Kota Gunungsitoli sebanyak **14 Perda** dengan persentase capaian **58,33%**. Selisih capaian (dari tahun 2018 s/d 2017) menurun **2,08%**. Hal ini disebabkan oleh:

a. Belum ada bahan Ranperda yang disampaikan oleh Pemko ke Lembaga DPRD (jika pengajuan Ranperda dari Inisiatif Pemerintah Kota Gunungsitoli;
b. Bahan Naskah Akademik belum selesai pengerjaannya oleh Pihak Ketiga (jika Ranperda dari Inisiatif DPRD Kota Gunungsitoli).

3. Ragam penunjang kegiatan DPRD

Beberapa penunjang kegiatan DPRD yang terlaksana untuk tahun 2018 yakni :

1). Pelaksanaan Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah Dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama;
2). Pelaksanaan Reses;
3). Pelaksanaan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah;
4). Pelaksanaan Rapat Kerja Panitia Khusus (PANSUS) DPRD Kota Gunungsitoli;
5). Pelaksanaan Rapat Kerja Komisi – Komisi DPRD Kota Gunungsitoli;

6). Penyediaan Pemeriksaan Kesehatan (General Check-up) Pimpinan dan Anggota DPRD;

7). Pelaksanaan Rapat Kerja Badan – badan DPRD Kota Gunungsitoli;

8). Pelaksanaan pemerliharaan gedung kantor DPRD;

9). Pelaksanaan Ramah Tamah DPRD Kota Gunungsitoli;

10). Pelaksanaan Pengadaan Pakaian Dinas.

Dari beberapa kegiatan penunjang yang terlaksana pada tahun 2018 sebanyak **10** kegiatan dari **10** yang ditargetkan dengan persentase capaian **100%** (Bobot : **Sangat Baik**). Dibanding dengan tahun 2017, kegiatan penunjang yang direncanakan **9** kegiatan dan terealisasi **9** kegiatan dengan capaian kinerja **100%**. Selisih capaian (dari tahun 2018 s/d 2017) sebesar **0%**. Hal ini disebabkan kegiatan penunjang DPRD Kota Gunungsitoli yang direncanakan disediakan secara keseluruhan benar – benar dilaksanakan sebagai bentuk dukungan Pemerintah Kota Gunungsitoli untuk memfasilitasi kegiatan DPRD Kota Gunungsitoli.

3.3. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun 2018 Dengan Tahun Sebelumnya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2018			Tahun 2017			Selisih Capaian (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(4)	(5)	(6)	(6)
1.	Terfasilitasinya rapat – rapat DPRD Kota Gunungsitoli	Jumlah rapat yang terlaksana	650 Kali	397 Kali	61,08	778 Kali	412 Kali	52,96	8,12
		Jumlah Penetapan Ranperda menjadi Perda oleh DPRD	16 Perda	9 Perda	56,25	24 Perda	14 Perda	58,33	-2,08
2.	Tersedianya instrument penunjang kegiatan DPRD Kota Gunungstioli	Jumlah ragam penunjang kegiatan DPRD	10 Kegiatan	10 Kegiatan	100	9 Kegiatan	9 Kegiatan	100	0

3.4. Realisasi Keuangan Perangkat Daerah Tahun 2018

Untuk Tahun Anggaran 2018, Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli memiliki anggaran sebesar **Rp. 26.693.276.327,- (Dua puluh enam miliar enam ratus**

sembilan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri dari :

1). Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 12.931.025.000,- (Dua belas miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta dua puluh lima ribu rupiah);

2). Belanja Langsung sebesar Rp. 13.762.251.327,- (Tiga belas miliar tujuh ratus enam puluh dua juta dua ratus lima puluh satu ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah).

Berikut tabel Realisasi Anggaran Belanja Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2018 :

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1.	**Belanja Tidak Langsung**	**12.931.025.000**	**12.135.217.215**	**93,85%**
	Belanja Pegawai	12.931.025.000	12.135.217.215	93,85%
2.	**Belanja Langsung**	**13.762.251.327**	**12.414.242.921**	**286,33%**
	Belanja Pegawai	894.243.000	879.425.500	98,34%
	Belanja Barang dan Jasa	12.642.123.907	11.312.299.701	89,48%
	Belanja Modal	225.884.420	222.517.720	98,51%
	JUMLAH	**26.693.276.327**	**24.549.460.136**	91,97%

Berikut tabel Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2018 :

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
I.	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**2.753.625.036**	**2.439.583.452**	**88,60%**
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.345.000	9.345.000	100%
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	151.798.816	115.372.480	76,00%
3.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	11.000.000	1.224.800	11,13%
4.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	539.444.800	539.444.800	100%
5.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	82.604.480	82.519.700	99,90%
6.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	93.802.000	82.374.972	87,82%
7.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	15.279.225	15.144.095	99,12%
8.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	4.860.000	4.601.300	94,68%
9.	Penyediaan Makanan dan Minuman	648.406.800	486.546.600	75,04%
10.	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	619.400.000	617.622.953	99,71%
11.	Monitoring / Survey / Pendataan / Pengawasan / Evaluasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Di Dalam Daerah	81.900.000	64.500.000	78,75%
12.	Penyediaan Jasa Administrasi Umum	182.049.675	167.230.500	91,86%
13.	Penyediaan Jasa Supir/Kemet/Operator Alat-Alat Berat	22.844.800	22.844.800	100%
14.	Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor	29.844.640	29.834.350	99,97%
15.	Penyediaan Jasa Tenaga Ahli dan Sekretariat Fraksi	150.044.800	150.044.800	100%
16.	Penyediaan Iuran Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia	10.000.000	10.000.000	100%
17.	Penyediaan Iuran Asosiasi Sekretariat DPRD Kota Seluruh Indonesia	1.000.000	1.000.000	100%
18.	Penyediaan Biaya General Check up Pimpinan dan Anggota DPRD	100.000.000	39.932.302	39,93%

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
II.	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**410.655.420**	**400.164.026**	**97,45%**
1.	Pengadaan Meubelair	76.748.000	75.288.000	98,10%
2.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	144.276.420	142.628.420	98,86%
3.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	49.981.000	49.429.840	98,90%
4.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	74.400.000	68.448.846	92,00%
5.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	50.250.000	49.390.000	98,29%
6.	Pembangunan Pos Jaga	15.000.000	14.978.920	99,86%
III.	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**160.000.000**	**157.405.600**	**98,38%**
1.	Mengikuti Diklat Bimtek / Workshop / Pelatihan / Kursus / Sosialisasi	160.000.000	157.405.600	98,38%
IV.	**Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah**	**10.421.095.871**	**9.401.089.843**	**90,21%**
1.	Hearing / Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah Dan Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama	35.159.204	5.954.820	16,94%
2.	Rapat - Rapat Paripurna Istimewa	59.231.360	34.742.360	58,66%
3.	Kegiatan Reses	798.837.000	645.157.880	80,76%
4.	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	199.500.000	173.100.000	86,77%
5.	Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD	2.596.518.209	2.344.154.697	90,28%
6.	Kerja Panitia Khusus (PANSUS) DPRD Kota Gunungsitoli	1.341.085.717	1.177.147.796	87,78%
7.	Kerja Badan - Badan DPRD Kota Gunungsitoli	1.759.657.950	1.715.277.758	97,48%
8.	Kerja Komisi - Komisi DPRD Kota Gunungsitoli	1.395.563.360	1.355.805.133	97,15%
9.	Penyediaan buku Risalah-risalah Rapat dan Perda Kota Gunungsitoli	30.000.000	21.865.000	72,88%
10.	Pelaksanaan Rapat-rapat Fraksi	38.915.478	34.280.069	88,09%
11.	Rapat Kerja DPRD Kota Gunugsitoli	42.419.970	26.933.400	63,49%
12.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif	284.808.803	73.745.062	25,89%
13.	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsulatasi Ke Luar Daerah Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD Kota Gunungsitoli	1.591.598.820	1.546.762.868	97,18%
14.	Pengadaan Pakaian Dinas	247.800.000	246.163.000	99,34%
V.	**Program Kerja Sama Informasi dan Media Massa**	**16.875.000**	**16.000.000**	**94,81%**
1.	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	16.875.000	16.000.000	94,81%
	TOTAL	**13.762.251.327**	**12.414.242.921**	**90,21%**

Dari data keuangan tersebut di atas, terlihat bahwa anggaran Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli sebesar **Rp. 13.762.251.327,-** dapat terealisasi dengan serapan dana sebesar **Rp. 12.414.242.921,-** atau **90,21%** untuk pembiayaan seluruh program dan kegiatan kerja Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli selama Tahun

Anggaran 2018, meskipun serapan dana tidak mencapai 100% namun dari aspek pelaksanaan kegiatan telah terlaksana sebesar **94,65%**.

BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah disusun berdasarkan tolak ukur Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli Tahun 2016. Dalam hal mekanisme pengukuran Kinerjanya dinilai melalui proses pengukuran indikator kinerja yang telah ditetapkan dan selanjutnya ditetapkan capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja.

Secara umum, kegiatan Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli selama Tahun Anggaran 2018 telah terlaksana dengan baik, namun secara teknis operasional masih ditemui beberapa kelemahan dan kekurangan terutama dalam hal pengkoordinasian berbagai kegiatan Anggota DPRD Kota Gunungsitoli dan hal ini akan dilakukan perbaikan pada Tahun Anggaran berikutnya.

4.2. Saran

Dengan memperhatikan berbagai kendala dalam pencapaian kinerja tahun 2018 beberapa hal yang menjadi saran untuk peningkatan kinerja ditahun mendatang, antara lain :

1. Konsistensi Rapat Pimpinan DPRD untuk menentukan skala prioritas dalam pelaksanaannya. Tidak terlepas fungsi fasilitasi Sekretariat DPRD dalam mengingatkan setiap agenda kerja DPRD Kota Gunungsitoli sehingga tercapai secara keseluruhan penetapan Ranperda menjadi Perda Kota Gunungsitoli.
2. Perlu dilakukan perencanaan yang matang pada kegiatan DPRD sebagai konsekuensi peningkatan secara optimal kinerja Lembaga Legislatif

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli Tahun 2018 disampaikan, sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan lebih lanjut.

Gunungsitoli, 31 Januari 2019
SEKRETARIS DPRD KOTA GUNUNGSITOLI,

MEISONIMAN LAHAGU, SH, M.SI
PEMBINA
NIP. 19690519 200112 1 002